

**Implementation of Sidoarjo Regency Regulation Number 2 of 2012 on
Implementation Parking In Sidoarjo
(Case Study subscribed Parking In Jalan Gajah Mada Sidoarjo)**

Sanjani Mas Agus Hardian

Tjitjik Rahaju

ABSTRACT

In order to prevent the leakage of revenue from parking and improving parking in Sidoarjo, Sidoarjo regency government to implement the payment mechanisms parking on a subscription basis. Payments are made every year in conjunction with the payment of motor vehicle tax in the Office unified administrative system in one roof in the entire region of East Java. Before the method of subscription be applicable, in 2005, revenue from the parking sector Sidoarjo Regency only reached Rp252.305.000,00 but while it implemented in 2012 revenues reached Rp20.754.231.000, 00. It shows that this mechanism contributes for revenue, but to be good, the implementation of policies not only focuses on revenue, services provided to the community over the obligation to pay must be given in accordance with the provisions of parking services based on the latest regulations on the administration of parking regulations contained in Sidoarjo Regency Regulation Number 2 of 2012 on Implementation Parking In Sidoarjo.

The purpose of this study was to describe the Implementation of parking services in Gajah Mada Street provided by the Sidoarjo Regency Government to the public in exchange for the obligation to pay parking fees each year with Edward implementation model based on 4 indicators such as: Disposition, Communication, Resource and organizational Structure. The method used is descriptive qualitative approach. Techniques of data analysis in this study is data collection, data reduction, data display and conclusion.

Results indicate the implementation Sidoarjo Regency Regulation Number 2 of 2012 on park maintenance subscription at Gajah Mada street not running optimally. There should be improvements to accommodate the SOP (Standart Operational Procedure). In the communication variables still need to improve the quality of communication to the public regarding the exact position of the parking spot to subscribe and calls people not to reward a park attendants. Variable disposition necessary emphasis on providing control cards, and low incentives that affect parking officer who acts in a park interpreter to perform its obligations as in giving tickets to park users from outside sidoarjo. Variable resources've felt pretty good by park users Jalan Gajah Mada. Indicators of organizational structure needs improvement on overlapping and splitting the number of wild park interpreter. Some things that can be suggested are increased socialization, welfare parking attendants, wild parking attendants control, prevention of overlapping and tightening of the control card.

Keywords: Implementation, Free Subscription

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo
(Studi Kasus Parkir Berlangganan Di Jalan Gajah Mada Sidoarjo)**

Sanjani Mas Agus Hardian

Tjitjik Rahaju

ABSTRAK

Dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran pendapatan dari sektor parkir serta meningkatkan pelayanan parkir di Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan mekanisme pembayaran parkir secara berlangganan. Pembayaran dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat di Seluruh wilayah Jawa Timur. Sebelum metode parkir berlangganan diterapkan, pada tahun 2005, pendapatan dari sektor parkir Kabupaten Sidoarjo hanya mencapai Rp252.305.000,00, namun setelah diterapkan, pada tahun 2012 pendapatan mencapai Rp20.754.231.000,00. Hal itu menunjukkan bahwa mekanisme ini memberi kontribusi yang baik bagi pendapatan, namun untuk dikatakan baik, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas kewajiban membayar pun harus diberikan sesuai dengan ketentuan pelayanan parkir yang didasari dengan peraturan yang tertuang pada peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pelayanan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat sebagai ganti atas kewajibannya membayar retribusi parkir setiap tahunnya dengan berlandaskan model implementasi yang dikembangkan Edward yang dilihat dari indikator Disposisi, Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil menunjukkan pelaksanaan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada belum berjalan dengan maksimal. Perlu adanya perbaikan pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan SOP parkir yang telah ditetapkan. Pada variabel komunikasi masih perlu peningkatan kualitas komunikasi kepada masyarakat mengenai posisi pasti titik parkir berlangganan serta himbauan masyarakat untuk tidak memberi imbalan kepada juru parkir. Variabel disposisi perlu penekanan pada penyediaan kartu kendali, serta rendahnya insentif yang diterima juru parkir yang berpengaruh pada tindakan juru parkir dalam melaksanakan kewajibannya seperti dalam memberikan karcis kepada pengguna parkir yang berasal dari luar Sidoarjo. Dari variabel sumber daya dirasakan sudah cukup baik oleh pengguna parkir Jalan Gajah Mada. Indikator struktur organisasi perlu perbaikan atas terjadinya tumpang tindih jabatan atau *overlapping* serta pemekaran jumlah juru parkir liar. Beberapa hal yang dapat disarankan adalah peningkatan sosialisasi, peningkatan kesejahteraan juru parkir, pengendalian jukir liar, pencegahan *overlapping* dan pengetatan penyediaan kartu kendali.

Kata kunci: Implementasi, Parkir Berlangganan

I. LATAR BELAKANG

Parkir adalah salah satu potensi besar mengingat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Jumlahnya mencapai 85,601,351 (<http://www.bps.go.id>). Maka penting bagi pemerintah untuk mampu mengelola potensi tersebut. menanggapi peluang tersebut pemerintah menciptakan peraturan yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan parkir yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Untuk membagi wewenang penyelenggaraan parkir antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan dalam (Mardiasmo, 2004:141) mengenai pihak yang berhak mengelola parkir dengan membagi jenis penerimaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menyebutkan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota adalah Pajak Parkir.

Peluang ini yang kemudian ditangkap oleh Kabupaten Sidoarjo untuk menggali potensi retribusi parkir sebagai upaya dalam mengelola sektor parkir agar dapat memberikan sumbangsih besar terhadap pendapatan daerah. Hingga pada tahun 2006 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang retribusi parkir, ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi parkir yang kemudian mengalami revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan pada

tanggal 10 Februari 2012 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pembayaran parkir dapat dilakukan secara berlangganan.

Namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai kendala seperti kurangnya titik parkir, tindakan juru parkir yang menarik kendaraan berstiker parkir berlangganan, dan penafsiran berbeda mengenai pelaksanaan parkir berlangganan dimana masyarakat menganggap bahwa peraturan daerah tentang parkir tidak mewajibkan membayar parkir secara berlangganan, namun pemerintah tetap mewajibkan pembayaan parkir berlangganan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo dapat dideskripsikan melalui empat kriteria yang dianggap berpengaruh dalam implemenstasi kebijakan menurut George Edward III. Model ini dirasa cocok oleh peneliti untuk lebih memudahkan dalam mendeskripsikan kebijakan publik yang dipilih. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo yang di dalamnya memenuhi kriteria dalam empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Implementasi akan dilihat berdasarkan 4 variabel tersebut yang meliputi : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Setelah melihat keadaan dilapangan dari sudut pandang keempat variabel tersebut maka akan dapat dideskripsikan mengenai Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan dimasa yang akan datang.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan Di Jalan Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo?”.

B. TUJUAN

Penelitian ini pada hakekatnya adalah mendeskripsikan mengenai implementasi suatu kebijakan melalui analisa data dan informasi yang diperoleh di lapangan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo dengan studi kasus Parkir Berlangganan di Jalan Gajah Mada Sidoarjo.

C. MANFAAT

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk memperkaya teori kebijakan publik khususnya mengenai kajian implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan kemampuan dalam hal peneltian serta aplikasi teori yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga mampu memberikan bekal dalam penyelesaian berbagai tantangan dalam dunia kerja di masa mendatang.

b. Bagi Universitas

Menambah kelengkapan daftar rujukan di Universitas Negeri Surabaya bagi penulis lain terkait pembahasan implementasi parkir berlangganan Di Sidoarjo.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Memberikan suatu gambaran praktis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat menjadi suatu rujukan dalam perbaikan implementasi parkir berlangganan di Sidoarjo kedepannya.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas R. Dye dalam Parsons (2005:xi) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Pengertian dari Thomas R. Dye ini memiliki lingkup kajian yang luas, mencakup proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil dari tindakan yang diambil pemerintah dalam masalah publik.

2. Tipologi Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dikelompokkan berdasarkan dampak sosial dan hubungannya dengan pembentukan kebijakan (Agustino, 2008:91-93) yaitu:

- a. Kebijakan *distributive* adalah kebijakan dalam mengalokasikan pelayanan atau manfaat terhadap segmen tertentu dari masyarakat-individu, kelompok, perusahaan dan masyarakat.
- b. Kebijakan *redistributive* termasuk usaha hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok-kelompok penduduk, misalnya dari kelompok kaya kepada kelompok miskin.
- c. Kebijakan *regulatory* adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang.

d. Kebijakan *self-regulatory* adalah kebijakan yang membatasi atau mengawasi terhadap suatu kelompok yang dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada kelompok tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melindungi atau mempromosikan kepentingan dari anggota kelompoknya.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Terdapat lima rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami yaitu:

- a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*): Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*): Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.
- c. Adopsi Kebijakan: Kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi.
- d. Implementasi kebijakan: Alternatif pemecahan masalah dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.
- e. Evaluasi kebijakan: Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi

Proses implementasi kebijakan dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:65) sebagai: *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions"* atau bisa diterjemahkan

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

2. Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006i:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta
- c. *Target group* atau kelompok sasaran.

3. Model-Model Implementasi

Ada berbagai model yang bisa digunakan dalam mendeskripsikan suatu implementasi. Salah satu model yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 adalah Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan pubiknya dengan Direct and Indirect Impact On Implementation dalam Leo Agustino (2006 : 149) dimana terdapat empat variabel

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan

tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

2. Sumberdaya

Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf: Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
- b. Informasi: dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
- c. Wewenang: Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas: fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edwards III, adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2006 : 152), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat: Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi.
- b. Insentif: Memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

C. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar

Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian berdasarkan tujuan penelitian ini adalah penelitian terapan. Menurut Gay dalam Sugiyono (2011:4) penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Sidoarjo.

B. Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengguna jasa parkir atau subjek parkir, Penjaga parkir, Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Pengawas parkir berlangganan Kepala Kantor Bersama Samsat

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi sebuah kebijakan publik. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo(Studi kasus Parkir Berlangganan di Jalan Gajah Mada Sidoarjo)adalah Pelaksanaan dari sebuah kebijakan pemerintah dalam program penyediaan

layanan parkir bagi masyarakat sidoarjo tanpa ada penarikan di tempat parkir yang termasuk dalam kawasan parkir berlangganan.

Implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilihat berdasarkan 4 variabel yang diungkapkan George Edward III dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Mulyono, 2009):

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan pertanyaan tertulis (Sugiyono, 2011:233). Pedoman wawancara adalah daftar yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai patokan dalam melaksanakan wawancara dengan responden.

2. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Dinas Perhubungan Sidoarjo ataupun yang berada di luar, yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi diambil dari foto-foto dilokasi penelitian.

3. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, dimana peranan tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang diamati kurang dituntut (Black dan Champion, 2001:289).

Observasi dilakukan dengan tak berstruktur

E. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian. Adapun tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini data yang telah didapatkan harus digolongkan, dibuang yang tidak perlu dan diorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas dilakukan dengan cara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo (Studi kasus Parkir Berlangganan di Jalan Gajah Mada Sidoarjo) instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam jenis kebijakan

distributive. Pembentukan kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2012 adalah dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat Sidoarjo dalam penyediaan parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan dana publik sebagai modal pelaksanaan. Dalam melakukan pembayaran parkir berlangganan, masyarakat Sidoarjo dilakukan bersamaan pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tepatnya pada Kantor Bersama Samsat pada seluruh wilayah Jawa Timur. Alur pembayarannya sesuai dengan alur pembayaran pajak kendaraan seperti biasa karena pembayarannya otomatis jadi satu dengan pembayaran pajak kendaraan. Setelah melakukan pembayaran pembayar dapat langsung mengambil stiker dengan menunjukkan STNK yang bertuliskan lunas parkir berlangganan.

Salah satu titik parkir yang dianalisis dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh George Edward III adalah Jalan Gajah Mada Sidoarjo yang menurut penuturan Bapak M Jaelani selaku Koordinator Wilayah Jalan Gajah Mada terdapat 19 titik parkir berlangganan yang tersebar disepanjang Jalan Gajah Mada. Berikut hasil yang didapat dari masing-masing indikator:

a. Disposisi

Juru parkir yang ada di Jalan Gajah Mada adalah orang-orang yang memang sudah lama menjalani profesi sebagai juru parkir di tempat tersebut. Sebelum ada peraturan tentang pengadaan parkir berlangganan di Sidoarjo mereka sudah terlebih dahulu menjalani profesi sebagai juru parkir di Jalan Gajah Mada.

Sebagai upah penjagaan atas kendaraan warga Sidoarjo di Jalan Majah Mada, juru parkir mendapat gaji atas tugasnya sebesar Rp700.000 setiap bulannya sebagai ganti atas upah

pungutan ditempat parkir. Namun yang menjadi keluhan juru parkir di Jalan Gajah Mada, pendapatan tersebut harus dipotong untuk ganti tiap bendel karcis parkir sebesar Rp150.000 untuk karcis mobil dan Rp100.000 untuk motor.

Tentu saja hal itu dirasakan oleh juru parkir sangat memberatkan. Apabila setiap bulan harus mengeluarkan sebesar Rp250.000 maka pendapatan yang diterimanya sebesar Rp450.000. Apabila karcis diberikan kepada setiap pengguna parkir, maka karcis dengan harga sekian dapat saja habis dalam beberapa hari dan harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli karcis. Untuk mensiasati agar pengeluaran untuk karcis tidak terlalu besar, maka juru parkir tidak memberiksn karcis kepada pengguna parkir ber plat luar Sidoarjo. sehingga karcis bisa dihemat untuk waktu yang lama karena pada karcis tidak ada batas masa berlakunya karcis tersebut. Karcis baru akan diberikan apabila ada yang meminta. Biasanya pelanggan yang meminta karcis adalah Sales yang memang dari kantornya bekerja meminta karcis tanda parkir. Alasan kurangnya pendapatan juru parkir memang menjadi kendala pelaksanaan parkir berlangganan. Dinas Perhubungan menjadi kurang tegas dalam melakukan himbauan untuk tidak memberi imbalan pada juru parkir.

Muncul permasalahan lain dari pelaksanaan parkir berlangganan. Perbaikan perlu dilakukan dalam hal kewajiban menyerahkan kartu kendali pada pengguna parkir berlangganan sebagai pengganti karcis pada parkir berlangganan.

b. Komunikasi

Dari indikator komunikasi, Pemerintah Sidoarjo dirasakan kurang perihal kepastian titik parkir. masyarakat kurang memahami letak pasti dari parkir berlangganan yang tersebar di Sidoarjo.

Mereka mengetahui titik parkirnya saat mereka mengunjungi suatu lokasi dan menemukan tanda kawasan bebas retribusi parkir berlangganan. Selebihnya tidak ada pemberitahuan mengenai titik parkir.

Selanjutnya adalah mengenai himbauan tentang tidak memberi imbalan pada juru parkir bagi kendaraan berplat Sidoarjo. Memang di salah satu titik di Jalan Gajah Mada terdapat spanduk mengenai himbauan untuk tidak memberi. Namun dirasakan kurang tegas oleh masyarakat. Apabila memang dijadikan aturan yang tegas agar tidak ada transaksi pembayaran parkir berlangganan, maka perlu ada sosialisasi secara menyeluruh, misalnya melalui RT setempat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudibyo.

c. Sumber Daya

1) Pelaksana

a) Juru Parkir

Jumlah juru parkir yang terdapat pada Jalan Gajah Mada mencapai 60 orang, seperti pada penjelasan Bapak M. Jaelani selaku koordinator wilayah Jalan Gajah Mada serta dapat dilihat pada struktur organisasi yang ada pada salah satu papan dalam ruang UPT Parkir yang menyebutkan jumlah juru parkir yang mencapai 60 orang. Mereka terbagi atas 2 shift, yaitu pagi dan sore. Jumlah tersebut dirasakan cukup dan tidak memberatkan bagi juru parkir.

b) Pengawas Juru Parkir

Demi terciptanya pelaksanaan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada, maka disediakan Pengawas juru parkir berlangganan yang akan mengawasi kinerja juru parkir agar tidak melakukan tindakan pelanggaran seperti penarikan ganda dan adanya juru parkir liar. Pengawas yang ada terbagi menjadi pengawas yang berasal dari Polres Sidoarjo dan Pengawas yang direkrut oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo. Pengawasan parkir berlangganan pada Jalan Gajah bisa

dikatakan sudah berjalan baik. Dengan kecukupan sumber daya pengawas serta bantuan dari pihak kepolisian tentu pelaksanaan pengawasan akan semakin baik.

c) Kantor Bersama Samsat

Menurut penjelasan pihak samsat, jumlah pegawai kantor bersama samsat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa dikatakan sudah cukup. Hal itu di sampaikan oleh Bapak Panrimo selaku Kepala Administrator Pelayanan Samsat.

2) Wilayah dan Fasilitas

Jalan Gajah Mada merupakan salah satu titik parkir berlangganan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan Sidoarjo dimana wilayahnya meliputi tepi jalan sebelah selatan jalan raya di sepanjang Jalan Gajah Mada yang terbagi atas 19 titik parkir.

Untuk menandai adanya kawasan parkir berlangganan, pada beberapa titik di Jalan Gajah Mada terdapat rambu yang menunjukkan adanya parkir berlangganan. Ada dua jenis rambu yang disediakan, yaitu tanda "P" (tanda tempat parkir) dan rambu bertuliskan "kawasan bebas Retribusi parkir kendaraan bermotor Kabupaten Sidoarjo"

Fasilitas lain yang disediakan adalah garis batas parkir sehingga kendaraan dapat mengetahui wilayah parkir berlangganan. Hal itu akan membantu para pengguna parkir dalam menempatkan kendaraannya sehingga kondisi parkir akan rapi. Fasilitas-fasilitas tersebut ternyata sudah memberi kenyamanan bagi pengguna parkir serta kemudahan juru parkir dalam menjalankan kewajibannya.

3) Informasi

Pelaksanaan kewajiban masing-masing pelaksana tentunya tidak akan baik jika tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Mereka membutuhkan penjelasan mengenai tugas dan kewajibannya dan bagaimana harus melakukannya. Informasi semacam itu telah banyak diterima oleh pelaksana parkir berlangganan. Karena setiap bulan saat pengambilan upah kerja, juru parkir, pengawas parkir dikumpulkan untuk memperoleh pengarahan dari Dinas Perhubungan Sidoarjo, seperti yang telah dijelaskan pada variabel komunikasi di atas.

Dinas perhubungan melalui UPT Parkir juga memiliki SOP yang jelas, sehingga jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pengawas juru parkir juga memperoleh pendidikan dan pelatihan saat penerimaan sebagai pengawas, tentu saja informasi mengenai apa yang harus dilakukan bagaimana melakukannya telah diterima masing-masing pengawas. Selain pelatihan, pengawas juga memperoleh buku panduan tugas yang diterima masing-masing pengawas saat pelatihan, sehingga informasi bisa dilihat setiap saat. Tidak hanya itu, pada indikator komunikasi telah dijelaskan bahwa setiap bulan saat pembayaran upah, serta setiap hari setelah proses pelaporan tugas pengawas juga dikumpulkan untuk memperoleh pengarahan, sehingga informasi selalu diterima oleh pengawas juru parkir terkait pelaksanaan parkir berlangganan.

Pada petugas kantor bersama samsat, tidak ada SOP khusus bagi pembayar parkir berlangganan, hal itu dikarenakan alur pembayaran yang sama dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga SOP pelayanan mengacu pada pelayanan samsat. Pedoman informasi tersebutlah yang digunakan sebagai acuan informasi untuk pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya

4) Wewenang

Perihal legitimasi wewenang, parkir berlangganan khususnya pada Jalan Gajah Mada telah dilengkapi aturan pelaksanaan dengan baik. Setiap pelaksana telah memiliki aturan hukum yang jelas. Dimulai dari Dinas Perhubungan, Dishub merupakan dinas yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis parkir berlangganan. Kantor Bersama Samsat yang merupakan turunan dari Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu pelaksana yang berperan dalam proses penerimaan pembayaran parkir berlangganan oleh masyarakat Sidoarjo. Wewenang pelaksanaan tugasnya dijelaskan pada peraturan pelaksanaan parkir berlangganan yakni Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012, dalam pasal 15 ayat 2, Selain itu diperkuat dengan adanya MOU pelaksanaan bantuan tugas penerimaan pembayaran parkir. Selanjutnya adalah pengawas juru parkir. Fungsi pengawasan sebenarnya dilaksanakan langsung oleh Dinas perhubungan, namun dapat dibantu oleh Petugas Pengawas Parkir. Tugas bantuan tersebut ditafsirkan oleh Dinas Perhubungan melalui perekrutan petugas Pengawas Juru Parkir yang statusnya sebagai tenaga kontrak. Wewenang pelaksanaan tugas pengawas juru parkir berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 pasal 13. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas juru parkir dilengkapi dengan *Standart Opertional Procedure* (SOP). Selain pengawasan dari Dinas Perhubungan, pengawasan juga dilakukan oleh Polres Sidoarjo. Peranan Polres dalam tugas pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011. Pelaksana yang terakhir adalah juru parkir. juru parkir merupakan ujung tombak pelayanan parkir berlangganan yang berhubungan langsung dengan penerima layanan atau masyarakat. Pelaksanaan tugas juru parkir berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun

2012 pasal 11 yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Juru Parkir.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa wewenang pelaksanaan tugas masing-masing pelaksana sudah memiliki legitimasi, sehingga bisa dikatakan baik.

d. Struktur Birokrasi

Melihat pada pelaksanaan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada, berdasarkan wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT Parkir, Bapak M. Jaelani, beliau menjelaskan bahwa semus pelaksana yang meliputi Juru parkir, Pengawas dan Dinas Perhubungan sendiri sudah memiliki SOP.

Pada SOP pelayanan khusus parkir berlangganan pada kantor berama samsat ternyata tidak ada, namun terbantu dengan SOP yang dimiliki oleh kantor bersama samsat, karena mekanisme pelayanan yang sama dengan pelayanan pajak kendaraan, sehingga pelayanan yang baik tetap bisa diterima oleh masyarakat pembayar parkir berlangganan.

Pada penjabaran tugas dan fungsi dalam bentuk struktur organisasi, UPT parkir memiliki struktur yang kompleks. Dimulai dari Kepala UPT, staf tata usaha, petugas informasi. Pada bagian lapangan parkir berlangganan dipimpin oleh koordinator wilayah yang memimpin masing-masing wilayah yang terbagi menjadi lima wilayah, tiga pada wilayah Kecamatan Sidoarjo, satu pada wilayah Kecamatan Krian, dan satu pada wilayah Kecamatan Taman. Di bawah koordinator wilayah terdapat koordinator pengawas yang membawahi beberapa pengawas. Selanjutnya dibawah pengawas ada juru parkir.

Struktur yang kompleks akan menghasilkan pemecahan tugas dan wewenang secara baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Namun pada struktur terjadi *overlapping* pada

struktur, dimana Bapak M Jaelani menjabat 2 struktur sekaligus, yaitu pada Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Koordinator Wilayah Jalan Gajah Mada, dan Bapak Parwoto menjabat sebagai Koordinator Penyimpanan Barang dan koordinator wilayah. Akan lebih baik apabila satu orang menempati satu posisi, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

B. Pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pada parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada Sidoarjo

Untuk memperoleh penjelasan baik atau buruknya pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan pada Jalan Gajah Mada, maka setiap indikator yang telah disebutkan, dilihat dalam bentuk nyata dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam keseharian para pelaksana. Berikut analisis pada masing-masing indikator:

1. Disposisi

Apabila pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan secara efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2006 : 152), adalah Pengangkatan birokrat dan Insentif.

a. Pengangkatan Birokrat

Dilihat dari pengangkatan, pelaksana juru parkir merupakan orang-orang yang memang sudah berdedikasi dalam pelaksanaan tugasnya. Juru parkir pada Jalan Gajah Mada direkrut dari orang-orang yang sudah bekerja sebagai juru parkir pada Jalan Gajah Mada.

Pelaksanaan rekrutmen juru parkir melalui metode yang dilakukan Dinas Perhubungan Sidoarjo bisa dikatakan baik.

Langkah seperti itu bertujuan untuk menghindari konflik dengan juru parkir lama karena apabila dilakukan rekrutmen juru parkir baru, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik, dimana juru parkir lama yang melakukan “babat alas” untuk mencari lahan, merasa diserobot orang-orang baru.

Permasalahan mengenai pemahaman terhadap peraturan tentang parkir berlangganan mungkin rendah saat dilakukan rekrutmen, namun melalui pembinaan-pembinaan yang rutin dilakukan oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo, akan membantu juru parkir pada Jalan Gajah Mada dalam memahami tugas dan kewajibannya.

Pengawas juru parkir adalah salah satu pelaksana parkir berlangganan yang bertugas mengawasi juru parkir dalam bertugas untuk menghindari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. Pengawas parkir direkrut langsung oleh Dishub melalui mekanisme perekrutan yang ketat. Dimulai dari tes administrasi berupa kelengkapan berkas dengan syarat pendidikan minimal SMA atau SMK, dilanjutkan tes tulis, tes fisik dan diakhiri dengan interview atau wawancara.

Metode rekrutmen yang demikian bisa dikatakan sangat baik. Para pelaksana pengawas sebelum bertugas memperoleh seleksi yang ketat, sehingga diperoleh pengawas juru parkir yang benar-benar berpotensi. Ditambah dengan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pengawas Juru parkir maka memberikan bekal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan.

b. Insentif

Insentif dirasakan kurang pada sisi juru parkir. Upah sebesar Rp700.000 perbulan bisa dikatakan sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juru parkir. Berlaku juga pada pengawas juru parkir. tenaga kontrak

pengawas juru parkir dihargai dengan upah sebesar Rp1000.000 perbulan.

Pengaruh insentif dapat dibuktikan pada pelaksanaan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada. Pelaksanaan parkir berlangganan pada Jalan Gajah Mada dapat dinilai kurang baik akibat rendahnya insentif yang diterima oleh pelaksana. Muncul berbagai kendala dari sudut pandang disposisi atau komitmen pelaksana.

Masalah yang muncul adalah dari kewajiban juru parkir dalam memberikan karcis pada mobil berplat luar Sidoarjo. Pelaksanaan kewajiban tersebut, dinilai kurang baik dikarenakan banyak tindakan juru parkir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Pelanggaran tersebut ternyata menjadi hal yang biasa dilakukan oleh juru parkir. Dinas Perhubungan yang mengetahui hal tersebut ternyata memaklumi tindakan tersebut dikarenakan merasa iba atas rendahnya upah yang diterima juru parkir setiap bulannya.

Tindakan memaklumi pelanggaran juga terjadi pada himbauan kepada masyarakat tentang kesadaran untuk tidak memberi. Pernyataan spanduk yang ada pada salah satu titik di Jalan Gajah Mada, pihak Dinas Perhubungan justru tidak melarang juru parkir untuk menerima uang dari pengguna parkir berlangganan. Dinas perhubungan ber alasan gaji nya juru parkir terlalu kecil, kasihan kalau tidak diperbolehkan menerima.

Permasalahan lain adalah mengenai kewajiban memberi kartu kendali. Kartu kendali merupakan syarat kelengkapan bagi juru parkir sesuai SOP juru parkir serta syarat bagi pengajuan klaim atas kehilangan kendaraan yang diparkir, maka penting keberadaannya.

2. Komunikasi

Ada beberapa yang dirasakan kurang, yakni mengenai titik parkir. sejumlah masyarakat mengetahui titik

parkir hanya melihat dari rambu tanda parkir berlangganan. Dinas perhubungan diharapkan lebih intensif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai titik parkir.

Selain titik parkir, himbuan mengenai larangan memberi imbalan diharapkan juga lebih diintensifkan. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat memberi imbalan guna mensukseskan parkir berlangganan seperti yang dicantumkan pada salah satu spanduk yang terpasang pada salah satu titik yang ada pada Jalan Gajah Mada. Harapan masyarakat, dinas perhubungan bisa melakukan himbuan tersebut melalui media masa seperti televisi maupun lebih intensif lagi melalui RT setempat seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber.

3. Sumber Daya

Pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan pada Jalan Gajah Mada dapat dikatakan sudah baik. Penjelasan mengenai pelayanan yang diberikan oleh juru parkir disampaikan oleh masyarakat sudah baik. Jumlah juru parkir dengan luas wilayah Jalan Gajah Mada dapat dikatakan sudah sesuai dengan beban tugas yang diemban oleh juru parkir. pernyataan tersebut dikatakan oleh salah satu petugas juru parkir yang ada di Jalan Gajah Mada.

Tugas pengawasan juga dirasakan sudah cukup seperti yang diungkapkan oleh pengawas juru parkir. Dirasakan tidak memberatkan karena seorang pengawas mengemban tanggungjawab untuk mengawasi 5-7 orang juru parkir.

Dari sudut pandang fasilitas, parkir berlangganan Jalan Gajah Mada dilengkapi dengan rambu penanda kawasan parkir berlangganan, dilengkapi juga dengan fasilitas garis batas kendaraan, dilengkapi juga dengan "berem" yang membatasi kendaraan dengan trotoar yang berfungsi membatasi

wilayah parkir dengan trotoar jalan sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dalam menjalankan fungsinya, setiap pelaksana sudah memperoleh SOP sehingga informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi serta bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya telah dipahami oleh masing-masing pelaksana dalam memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada.

Pada indikator sumber daya, parkir berlangganan bisa dikatakan baik dalam implementasinya, karena setiap variabel dalam indikator sumber daya telah dipenuhi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4. Struktur Organisasi

Melihat dari sudut pandang SOP pada pelaksanaan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada, nampak pelaksanaannya bisa dikatakan baik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masing-masing pelaksana telah memiliki SOP yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan.

Pada penjabaran tugas dan fungsi dalam bentuk struktur organisasi, UPT parkir memiliki struktur yang kompleks. Dimulai dari Kepala UPT, staf tata usaha, petugas informasi. Pada bagian lapangan parkir berlangganan dipimpin oleh koordinator wilayah yang memimpin masing-masing wilayah yang terbagi menjadi lima wilayah, tiga pada wilayah Kecamatan Sidoarjo, satu pada wilayah Kecamatan Krian, dan satu pada wilayah Kecamatan Taman. Di bawah koordinator wilayah terdapat koordinator pengawas yang membawahi beberapa pengawas. Selanjutnya dibawah pengawas ada juru parkir.

Namun disayangkan terhadap terjadinya *overlapping* pada struktur. Permasalahan serius yang harus dihadapi oleh Pemerintah Sidoarjo adalah banyak

ditemukan kasus juru parkir berlangganan yang memiliki anak buah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana parkir berlangganan sudah dilaksanakan dengan baik namun perlu peningkatan kualitas komunikasi pada *target group*, yaitu mengenai titik parkir dan himbuan untuk tidak memberi imbalan pada juru parkir.

2. Sumber Daya

Dari sudut pandang sumber daya, jumlah staf pelaksana sudah cukup, penyediaan fasilitas sudah dilaksanakan secara baik, informasi tugas dan kewajiban sudah dimiliki oleh pelaksana dan wewenang masing-masing pelaksana sudah memiliki legalitas.

3. Disposisi

Pada variabel disposisi, masih memerlukan perbaikan pada pelaksanaannya, diantaranya mengenai insentif juru parkir yang kurang, sehingga mempengaruhi komitmen juru parkir dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan kartu kendali dan memberikan karcis parkir pada kendaraan luar Sidoarjo.

4. Struktur Organisasi

Dari sudut pandang struktur organisasi telah dilaksanakan dengan baik. Fragmentasi telah dilaksanakan dan SOP pelaksana telah tersedia. Namun perlu perbaikan mengenai *overlapping* jabatan dan pertumbuhan jumlah juru parkir liar.

B. SARAN

meningkatkan pengenalan dan pemahaman masyarakat tentang parkir berlangganan melalui peningkatan sosialisasi, Peningkatan himbuan mengenai larangan memberi imbalan pada juru parkir untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat memberi imbalan pada juru parkir, Untuk menertibkan

pelaksanaan kewajiban juru parkir dalam memberi karcis kepada kendaraan berplat luar Sidoarjo, maka kesejahteraan juru parkir perlu ditingkatkan, Dinas Perhubungan Sidoarjo perlu melakukan pendekatan terhadap juru parkir berlangganan untuk tidak melakukan rekrutmen juru parkir baru, menghilangkan overlapping pada struktur organisasi UPT Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, dan melakukan pengetatan berkenaan dengan salah satu kewajiban juru parkir untuk memberikan kartu kendali sebagai pengganti atas karcis parkir bagi pengguna parkir berlangganan serta memasukkan kewajiban tersebut pada rincian tugas / pekerjaan yang ada pada prosedur kerja juru parkir berlangganan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Black, James A., dan Dean J. Champion. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta.
- Putra, Nusa, Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir*.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2008. *Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo*.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2012. *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo*.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo*.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan publik*. AIPI: Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing: Malang.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

<http://dprd-sidoarjokab.go.id/pemkab-sidoarjo-gandoli-parkir-berlangganan.html> diakses

pada tanggal 26 Januari 2013 pukul 10.24

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/139/jbptuni-kompp-gdl-s1-2007-nurfajriat-6906-bab-ii.pdf> diakses

pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 11.28

<http://www.beritajatim.com/parkirlangganan/DRDPRDSidoarjoUsulCabutParkirBerlangganan.htm> diakses pada tanggal 26 Januari 2013 pukul 10.47

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12 di akses pada tanggal 21 february 2013 pukul 10.52

<http://www.kabarsidoarjo.com/parkir-langganan/Program-Parkir-Berlangganan-Harus-Segera-Dievaluasi>

[kabarsidoarjo.com](http://www.kabarsidoarjo.com/parkir-langganan/Program-Parkir-Berlangganan-Harus-Segera-Dievaluasi) diakses pada tanggal 26 Januari pukul 10.31

<http://www.suryaonline.com/parkirlangganan/parkir-berlangganan-sidoarjo-rugikan-rakyat.html> diakses pada tanggal 26 Januari

2013 pukul 10.53